

KAPAS, KAIN DAN SERAGAM SEKOLAH DI JAWA 1900-1942

Sri Sulastr¹, Huddy Husin²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sejarah, FIPPS
Universitas Indraprasta PGRI
Email: srisulastr@gmail.com
Email: hudi0212@gmail.com

ABSTRACT

Education that took place during the colonial rule in practice not only has to do with the economic aspects alone, but also the inherent social aspects also inherent therein. The style of the colonial government control is likely to lead to racial model, also resides in the implementation of education policy at the time. The differences are apparent at: level / degree level of formal education that not all indigenous children and other non-European can follow, subjects vary diasup by indigenous children with European children, besides the more visible is related to clothes or the uniform worn by the students (there is a very significant difference between the uniforms used by European children with indigenous children).

Keyword : Cotton, Fabrics, School Uniforms, Java

ABSTRAK

Pendidikan yang berlangsung selama masa pemerintahan kolonial pada prakteknya tidak hanya bersangkutan-paut dengan aspek ekonomi saja, akan tetapi juga melekat pula segi-segi sosial yang inheren didalamnya. Corak penguasaan pemerintah kolonial yang cenderung mengarah pada model yang rasial, juga bersemayam didalam penerapan kebijakan dunia pendidikan pada saat itu. Perbedaan-perbedaan tersebut nampak pada : level/ jenjang tingkatan pendidikan formal yang tidak semua anak-anak pribumi dan non-Eropa lainnya dapat mengikuti, mata pelajaran yang berbeda-beda yang diasup oleh anak-anak pribumi dengan anak-anak Eropa, selain itu yang lebih terlihat ialah berkaitan dengan pakaian atau seragam yang dikenakan oleh para peserta didik (terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara seragam sekolah yang digunakan oleh anak-anak Eropa dengan anak-anak pribumi).

Kata Kunci : Kapas, Kain, Seragam Sekolah, Jawa

PENDAHULUAN

Sudah hampir lebih dari satu abad, bangsa ini telah mengenal dunia pendidikan modern yang bergaya barat. Terhitung sejak dimulainya kebijakan politik Etis (Irigasi, Edukasi dan Emigrasi) anak-anak pribumi (meskipun masih bersifat elitis) sudah dapat mengecap bentuk dan model pendidikan yang berbeda dengan model dan corak pendidikan tradisional (pesantren) yang sempat berkembang di Nusantara (Kartodirjo, 1992: 32; Blackburn, 2011: 132; Niel, 2009: 88). Meskipun dalam perjalanannya pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial saat itu sejatinya memang diarahkan untuk mendukung dan memuluskan kepentingan-kepentingan kolonial, dalam bentuk ketersediaan tenaga kerja (sumber daya manusia).

Satu hal yang pasti dalam upayanya menyelenggarakan dunia pendidikan di tanah jajahan, pemerintah kolonial sangat tergantung dari keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari aktivitas di sektor perekonomian Hindia-Belanda. Keuntungan terbesar yang didapatkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda menjelang diberlakukannya kebijakan politik Etis yakni hasil besar yang diraih melalui kebijakan tanam paksa (Kartodirjo, 1992: 26). Perluasan daerah-daerah taklukan yang produktif di seluruh Nusantara dapat dilakukan dengan semakin berkembangnya pundi-pundi keuangan pemerintah kolonial. Khususnya di pulau Jawa, dengan semakin menguatnya penguasaan pemerintah kolonial dengan semboyan *Pax Nerlandica* (Kartodirjo, 1992: 37; Niel, 2009: 49) menjadi semacam sinyal bahwa pemerintah kolonial hendak melakukan hegemoni dalam setiap sendi kehidupan masyarakat di Hindia-Belanda, tidak hanya dalam bidang ekonomi-politik akan tetapi juga hingga kehidupan sosial-budaya.

Pendidikan yang berlangsung selama masa pemerintahan kolonial pada prakteknya tidak hanya bersangkut-paut dengan aspek ekonomi saja, akan tetapi juga melekat pula segi-segi sosial yang inheren didalamnya. Corak penguasaan pemerintah kolonial yang cenderung mengarah pada model yang rasial, juga bersemayam didalam penerapan kebijakan dunia pendidikan pada saat itu (Niel, 2009: 84). Perbedaan-perbedaan tersebut nampak pada : level/ jenjang tingkatan pendidikan formal yang

tidak semua anak-anak pribumi dan non-Eropa lainnya dapat mengikuti, mata pelajaran yang berbeda-beda yang diasup oleh anak-anak pribumi dengan anak-anak Eropa, selain itu yang lebih terlihat ialah berkaitan dengan pakaian atau seragam yang dikenakan oleh para peserta didik (terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara seragam sekolah yang digunakan oleh anak-anak Eropa dengan anak-anak pribumi).

Membahas mengenai kebijakan dunia pendidikan pada era pemerintahan kolonial Belanda, memang tidak lepas dari perbedaan-perbedaan dan ketimpangan baik dalam proses maupun luaran pendidikannya. Salah satu fenomena yang menarik dari penerapan kebijakan dunia pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ialah penggunaan seragam sekolah dalam proses belajar mengajar. Seragam atau pakaian yang digunakan dalam proses belajar mengajar tidak hanya menjadi penanda bagi orang-orang yang berkesempatan untuk mengenyam dunia pendidikan, akan tetapi lebih dari itu juga menjadi semacam penanda terhadap status sosial/ golongan, selain itu juga dapat menjadi batas pemisah dan pembeda antara anak-anak pribumi dengan anak-anak yang berasal dari Eropa (pada halaman lembaran proposal disertakan pula gambar-gambar seragam sekolah pada masa pemerintah kolonial Belanda).

Semenjak dikenalkannya seragam atau pakaian sekolah pada pertengahan abad ke-17 di Inggris, seragam atau pakaian sekolah mulai merambah dan digunakan keberbagai belahan dunia pada saat itu (www.wedaran.com). Khusus di Indonesia, seragam atau pakaian sekolah mulai dikenalkan ketika pelaksanaan kebijakan politik Etis. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa pakaian atau seragam sekolah, pada awalnya merupakan atribut yang digunakan oleh para murid-murid sekolah pada waktu itu sebagai pakaian wajib yang dikenakan pada saat mengikuti proses belajar mengajar. Selain sebagai identitas, dan status sosial, pakaian sekolah juga menjadi alat legitimasi bagi keberadaan kelas baru di Hindia-Belanda pada saat itu.

Guna memahami kompleksitas dari perjalanan dunia pendidikan nasional, upaya menempatkan kebijakan seragam sekolah sebagai focus kajian penelitian ini, akan memberikan pemahaman kepada kita mengenai dinamika dan

perkembangan dunia pendidikan yang tidak hanya selalu berkaitan dengan proses belajar dan mengajar. Sejatinya pendidikan merupakan sebuah kegiatan manusia yang cukup kompleks, karena di dalamnya terdapat segi-segi sosial budaya dan ekonomi serta politis yang menyusun keberadaannya (Tilaar, 2004: 71).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka upaya untuk mengungkap segi-segi lain yang menyeliputi dinamika dan perkembangan dunia pendidikan menjadi semacam upaya yang diharapkan untuk memahami lebih jauh mengenai arah dan perkembangan dunia pendidikan saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas: *pertama*, Sampai sejauh mana hubungan/jalinan keterlibatan aspek ekonomi (dalam hal ini modal) melalui penggunaan seragam sekolah sebagai atribut wajib yang dikenakan oleh peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat melalui fenomena over produksi dari komoditi kain di Hindia-Belanda memasuki awal abad ke-20.

Kedua, bagaimanakah kemudian menjawab kemunculan budaya urban yang terdapat dikota-kota centra niaga yang menjadi basis utama pendukung dunia pendidikan di Hindia-Belanda pada saat itu, dengan melihat sekolah-sekolah yang berdiri dikota-kota seperti Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya dan lain sebagainya. Aspek budaya semakin menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena terdapat korelasi antara penggunaan seragam sekolah dengan seragam sebagai alat legitimasi bagi kelas sosial baru yang lahir pada awal abad ke-20, yakni kelas priyayi (kaum intelektual terpelajar).

PEMBAHASAN

Situasi Sosial-Ekonomi Jawa Akhir Abad ke-19 dan Kebijakan Politik

Penempatan Jawa dan Batavia sebagai pusat eksploitasi kolonial dan pusat pemerintahan administratif, memberikan konsekuensi berupa perubahan tata sosial dan pembangunan sarana-prasarana pendukung pemerintahan. Dengan demikian pembangunan di Jawa membutuhkan sumber daya manusia (SDM) bagi pembangunan sarana-prasarana serta sumber daya manusia yang diplot untuk menjadi pegawai dalam bidang administratif pemerintahan. Semakin banyaknya sumber daya manusia yang berdatangan ke Jawa, berarti muncul kembali kebutuhan lainnya

seperti, sarana perumahan, sebagai tempat bermukim para penduduk baru di Jawa, sarana transportasi sebagai pendukung aktivitas dan mobilitas didalam perkotaan, sarana lainnya berupa sekolah (pendidikan), Bank dan kantor pos, makanan dan kesehatan, rumah ibadah, tempat hiburan, kamp militer dan lain sebagainya sebagai sub-sub kebutuhan skunder, primer dan tersier kota.

Pada masa-masa pembangunan infrastruktur dan suprastruktur kota-kota di Jawa ini, dimulailah satu fase yang disebut dengan gelombang modernisasi I di Nusantara, khususnya di Jawa. Modernisasi I di Jawa ini dapat kita lihat dalam bentuk dilepaskannya mode produksi masyarakat tradisional yang menggantungkan kehidupannya dengan mengelola tanah. sebuah ungkapan yang lazim dalam konteks masyarakat agraris, bahwa tanah merupakan sumber produksi dan kekayaan yang utama, dan karenanya pemilikannya membawa prestise yang tinggi; sebagai akibatnya maka klasifikasi penduduk yang masih bercirikan nilai-nilai tradisional didasarkan atas pemilikan tanah (Kartodirjo, 1984: 56). Penjelasan lain tentang masyarakat feodal-tradisional, "Masyarakat feodal-tradisional adalah masyarakat yang menempatkan tanah sebagai sumber utama pangan, kekayaan dan biaya pemerintahan Negara" (Darsono, 2006 : 104).

Orientasi pengembangan sebagai daerah pusat eksploitasi kolonial dan pusat pemerintahan administratif, dengan sendirinya di Jawa dibutuhkan para pekerja yang ahli atau mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan pemerintahan. Maka dari itu kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang terdidik dengan materi seperti kemampuan *Baca, Tulis dan Hitung* tetapi dengan jumlah gaji/ upah yang rendah amat dibutuhkan. Ada dua langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah kolonial Belanda dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk bekerja dipemerintahan dan sektor lainnya yang tetap berkaitan dengan kemampuan baca, tulis dan hitung, yakni *pertama*, dengan mendatangkan ahli-ahli (pekerja) dari negeri induk (Belanda) dan *kedua*, dengan mendidik anak-anak para pribumi dengan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah untuk didik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Cara pertama dianggap tidak efektif, karena akan membuat jumlah anggaran pengeluaran pemerintah

kolonial menjadi besar, karena para ahli yang didatangkan dari negeri induk memiliki jumlah bayaran/upah yang tidak sedikit, selain itu biaya transportasi dari negeri Induk (Belanda) ke Hindia-Belanda juga sangat besar.

Gaji/ upah yang rendah tetap menjadi prioritas bagi pemerintah kolonial Belanda, karena hal tersebut menjadi pedoman bagi menekan angka biaya pengeluaran/ belanja pemerintah kolonial Belanda. Maka dari itu pemerintah kolonial Belanda menetapkan cara yang kedua guna memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang dapat mencapai kepentingan kolonial. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia ini dijalankan dalam bentuk program *Batiq Slod* yaitu menekan pengeluaran sekecil mungkin dan memasukkan uang sebanyak mungkin. Salah satu upaya realisasi *Batiq Saldo* ini adalah penambahan Sumber Daya Manusia, yaitu melibatkan bumi putra sebagai support system dalam pemerintahan Van den Bosch karena dinilai lebih murah dibandingkan menghadirkan dan membayar Sumber Daya Manusia dari Belanda dan Eropa. Para bumi putera ini hanya tinggal dididik dengan pendidikan yang sesuai kebutuhan dan kebijakan pemerintah Van Den Bosch. Hingga tahun 1848 dikurangkanlah dana awal sebesar 25.000 Gulden untuk pendirian sekolah bagi bumiputera (Kartodirjo, 1992:11-12).

Jawa pada awal penguasaan langsung oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda, tidak berada dalam penguasaan lembaga politik (tradisionil). Hanya daerah *Vorstenlanden* seperti : Yogyakarta dan Surakarta yang masih memiliki penguasa lokal tradisional. Ketiadaan lembaga politik tradisional itulah yang akan memberikan pengaruh kepada penguasaan dan distribusi atas tanah. Penguasaan langsung atas tanah di sebagian besar daerah Jawa, didasarkan atas pengelolaan tanah yang sudah dilakukan sejak masa sebelum VOC masuk. Dengan seperti itu pemilikan atas tanah di daerah Jawa didasarkan atas pengelolaan dan pemilikannya yang bersifat turun temurun kepada generasi berikutnya (kepemilikan secara peribadi). Hal tersebut dapat dilihat melalui laporan survey berjudul *Eindresume van het Onderzoek naar de Rechten van den Inlander* . Di Jawa Barat hak milik perseorangan atas tanah (*Balong*) telah ada sejak dahulu, berdasarkan survey yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada tahun

1869, yang membuktikan sebagian besar desa-desa disepanjang daerah Jawa bagian Barat tanah yang dimiliki oleh perseorangan jauh lebih banyak dan luas dari pada tanah yang dimiliki secara komunal, sedangkan disebagian daerah di Jawa bagian tengah keadaannya justru sebaliknya (Koentjaraningrat, 2004: 316).

Penetrasi kolonial dalam bentuk perubahan mode produksi capital-kolonial yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, menyebabkan perubahan cara bertahan hidup dari para penduduk asli Batavia, dimana tanah pada awalnya menjadi bagian dari proses produksi guna bertahan hidup, maka dengan pemberlakuan kebijakan-kebijakan sosial-ekonomi membuat penduduk Batavia menjual tenaga mereka kepada modal/ investasi yang berbentuk perusahaan, industri, perusahaan pengangkutan/ transportasi, pegawai pemerintahan dan lain sebagainya.

Maka tidaklah mengherankan saat menjelang awal abad ke-19 di Batavia/ Jakarta dapat dengan mudah dijumpai masyarakat buruh. Buruh dalam terminologi masyarakat modern pertama kali muncul dalam konstruksi masyarakat Eropa (barat). Karl Marx merupakan tokoh yang menjelaskan tentang kemunculan masyarakat buruh dalam stratifikasi sosial di Eropa dalam perkembangan teknologi industri di Inggris. Munculnya teknologi industri (ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt), dalam menggantikan secara dominan peran tenaga kerja dalam usaha memproduksi barang-barang, dan berdampak pada kemunculan fenomena pengangguran secara besar-besaran di wilayah Eropa, khususnya Inggris.

Dalam perkembangan masyarakat Batavia selanjutnya pasca masuknya penetrasi capital-kolonial, terjadi perubahan dalam tatanan sosial masyarakat. Kemunculan gejala-gejala industrialisasi dan berdampak pada pelebaran dalam unsur superstruktur dalam bentuk administratif pemerintahan mengimbangi perkembangan basis struktur masyarakat. Kebutuhan terhadap tenaga kerja yang dapat melaksanakan, memajemen dan menjaga stabilitas produksi merupakan konsekuensi bagi kebutuhan dunia industri. Disisi lain kebutuhan terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam urusan administratif pemerintahan juga menjadi kebutuhan yang tidak

terelakkan. Maka posisi sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia untuk mengisi pos-pos yang dibutuhkan dalam masyarakat industrialisasi di Batavia semakin vital dan menentukan.

Hasil atau *out-put* dari lembaga-lembaga pendidikan inilah yang kemudian memunculkan kelas-kelas baru dalam masyarakat Batavia, kelas menengah yang kemudian acap kali disebut dengan kelompok elite atau *Priyayi* menjadi kelas baru yang muncul sebagai hasil dinamika modernisasi masyarakat Jawa saat itu. Sartono Kartodirjo, menjelaskan gejala tersebut sebagai :

“ *Proses modernisasi yang mengubah masyarakat tradisional kearah modern mendapat dorongan kuat dari komersialisasi hasil-hasil pertanian, transportasi dan komunikasi baru yang mengikutinya, birokratisasi serta pendidikan yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang sedang dalam proses pembaharuan itu*” (Kartodirjo, 1992 : vii).

Kelas baru dalam masyarakat Jawa ini juga disebut sebagai Elite atau *Priyayi* oleh Van Niels, dimana pengertian *Priyayi* menurutnya adalah Administratur, pegawai pemerintahan dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan dan berada ditempat yang lebih baik, baik dikota maupun dipedesaan yang berdiri diatas rakyat jelata, dan dalam beberapa hal memimpin, memberi pengaruh, mengatur serta menuntun masyarakat Indonesia (Niels, 2009 : 31).

Kemunculan kelas baru yang terdidik dalam konsep pendidikan ala barat inilah yang kemudian menjadi kelas yang mengerti dan sadar akan keadaan dan nasib dari bangsanya. Merekalah yang kemudian melakukan transformasi, penyadaran dan memimpin masyarakat luas lainnya tentang perlunya satu usaha bersama dan bahu-membahu guna mencapai cita-cita yang menjadi keniscayaan dimasa depan yakni tentang bangsa Indonesia yang merdeka.

Jalan panjang yang terjadi dalam aspek sosial-ekonomi masyarakat Batavia merupakan satu arena yang terbentuk sebagai manifestasi modernisasi yang terjadi pada masyarakat tradisional. Tradisionil dalam pengertian cara pandang dan *mindshet* berfikir pada locus-locus

masing-masing unit atau elemennya. Pada sub point kali ini, kita akan coba memahami bagaimana aspek atau dimensi sosial-ekonomi memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan dinamika masyarakat Batavia, khususnya penekanannya pada aspek cultural dan politik.

Apa yang kemudian muncul dalam ranah cultural dan politis, merupakan sebuah pantulan dari dinamika sosial-ekonomi masyarakat Batavia. Dengan semakin kuat dan meluasnya birokrasi pemerintahan kolonial Belanda, maka satu golongan baru dalam masyarakat Nusantara, khususnya di Batavia (kini Jakarta) yakni *priyayi*. Seperti yang dikatakan oleh Kuntowijoyo bahwa kelompok ini sudah lepas dari ikatan tradisionil seperti keraton, karena sub ordinasi mereka tidak lagi kepada raja tetapi kepada pemerintahan kolonial (2006 : 26). Masyarakat Batavia pada awal abad 19 yang notabene merupakan kumpulan dari berbagai suku bangsa, dan terbentuk karena kebutuhan penyerapan tenaga kerja yang profesional, sebagai buah dari runtuhnya tata sosial masyarakat tradisional.

Dengan semakin kuatnya pengaruh kebudayaan barat dan kebudayaan islam didaerah pinggiran, maka terbagi dua pusat/ sental dari kebudayaan tersebut. Keraton sebagai daerah penjaga nilai-nilai (kebudayaan) tradisionil dan kota-kota sebagai penyokong atau sumber bagi kebudayaan baru, dan *priyayi/* kelas menengah menjadi pendukung kebudayaan baru tersebut (Kuntowijoyo, 2006: 26). Dengan terbaginya dua pusat kebudayaan tersebut berarti akan memberikan pengaruh kepada tata sosial dan cara pandang masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Batavia sebagai tempat bertemunya ragam kebudayaan tidak hanya yang berasal dari pulau Jawa, mengalami sebuah proses pengenalan masing-masing kebudayaan dari masing-masing etnis yang membawa kebudayaan dari tempat asal mereka. Disisi lain Kebudayaan barat melalui (pendidikan ala barat) dan kebudayaan islam (melalui pesantren dan tarekat-tarekat), cukup kuat memberikan pengaruh kepada individu-individu di Batavia, efek-efek tersebut dapat kita lihat khususnya dalam kehidupan keseharian masyarakat Batavia.

Menurunnya pamor keraton sebagai centrum tata sosial masyarakat kolonial, memberikan

pengaruh berupa kemunculan pemerintahan kolonial dan islam sebagai centrum baru dalam tata sosial masyarakat kolonial. Jalinan relasi sosial-ekonomi yang lahir dalam masyarakat kapitalis-kolonial membuat cara pandang kelompok priyayi ini seperti orang-orang barat, priyai/ kelas menengah ini menjadi patron baru bagi nilai-nilai budaya, kesenian dan kesusasteraan baru. Kemunculan grup-grup sandiwara, pers nasional, orkes-orkes keroncong, dan arsitektur rumah gedong telah menunjukkan sikap baru yang bebas dari ikatan-ikatan tradisi. Gerakan kebudayaan baru itu berarti perubahan paradigmatik : budaya baru, patron baru, teknologi baru, dan locus baru, kota menjadi locus budaya baru (Kuntowijoyo, 2006 : 27).

Penetrasi kebudayaan asing yang masuk melalui pelembagaan-pelembagaan sosial inilah yang kemudian menjadi lahan subur bagi kemunculan budaya baru di Batavia. Budaya baru inilah yang kemudian menjadi warna bagi dinamika sosial-budaya di Batavia dan kelompok menengah (priyayi) memegang peranan penting menjadi produsen wujud-wujud baru kebudayaan. Terutama yang paling penting ialah kelompok kelas menengah priyayi menjadi yang paling terdepan dalam pembentukan system pengetahuan di masyarakat.

Kemunculan kebudayaan baru yang dianggap sebagai perilaku kebarat-baratan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan, khususnya dalam konteks pergaulan para priyayi. Seperti yang dituliskan oleh Van Niels :

“Banyak dokter-dokter muda pada tahun 1914, merasa sakit hati dan tersinggung oleh perlakuan yang mereka terima sewaktu menjadi mahasiswa STOVIA, peraturan STOVIA yang mengharuskan semua orang Jawa dan Sumatera yang bukan Kristen, memakai pakaian pribumi bila sedang berada disekolah. Dengan demikian ini tentu saja memaksa dokter-dokter muda ini tetap berada dalam lingkungan masyarakat asli mereka, ataupun suatu usaha membuat mereka puas dengan gaji yang agak kecil. Apapun alasannya sejumlah besar mahasiswa pribumi STOVIA menjadi tidak puas dengan

perlakuan ini dan menganggap hal ini sebagai tanda rendahnya kedudukan mereka di mata orang Eropa”. (Niel, 2009 : 87)

Berbagai persoalan-persoalan yang muncul, seperti fenomena tidak adilnya perlakuan pemerintah kolonial terhadap priyayi pribumi , dibandingkan dengan orang-orang asing seperti, eropa, china dan arab yang terkesan mendapat perlakuan khusus, menyulut rasa tidak suka kelompok terhadap bangsa eropa yang memandang rendah mereka.

Bagaimanapun kemunculan masyarakat Industri baru seperti Batavia, secara pasti memberikan konsekuensi dalam aspek religisitas. Dinamika industrialisasi yang telah memunculkan kelompok-kelompok proletariat dan kaum pekerja yang terombang-ambing dalam jaminan kehidupan yang absurd Dikarenakan terlepasnya mereka dari tata cara hidup tradisional, maka mereka membutuhkan satu pegangan yang dapat menenangkan dan memberikan ketentraman dihati mereka. Gelombang modernisasi yang memberikan efek baru berupa perubahan tata hidup yang sama sekali belum mereka kenal dan ketahui, menempatkan mereka kepada posisi yang sulit. Drama dari konsep keterasingan (Aliennansi) mereka terhadap dinamika sosial di era modernisasi ini pun dimulai. Konsep Alienansi di kemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya *Das Kapital* (volume I 1867), bahwa keterasingan manusia sebagai manusia dan status dirinya sebagai pekerja mengakibatkan dampak budaya yang lebih parah : manusia sekedar menjadi pekerja yang tidak lagi semata-mata terasing dari dunia keberadaan dirinya sebagai manusia, melainkan sekedar menjadi alat produksi, manusia pekerja ini tidak lagi memiliki kesadarannya sebagai manusia (Saptawasana & Cahyadi dalam teori-teori kebudayaan, 2005 : 22).

Sementara itu dalam tingkatan *grass root*, para penduduk yang mulai teralienansi dan kehilangan kepercayaan terhadap para priyayi (yang bekerja dalam pemimpin pemerintahan sipil) mulai merosot, karena mereka dianggap tidak sanggup atau tidak mau menentang gelombang perubahan yang dirasakan memberikan penderitaan bagi para penduduk. Maka dimulailah suatu masa dimana para penduduk mulai menjauhi para pemimpin sekuler

dan mencari kekuatan dan ketengangan pada agama mereka, dibawah bimbingan para pemimpin/ pemuka agama (kyai). Pada titik inilah pertumbuhan perasaan ke-Islam-an menguat, melakukan penolakan dan perlawanan yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk pendirian kelompok-kelompok yang berlandaskan nafas ajaran-ajaran islam. Sartono kartodirjo menerangkan bahwa ambruknya tatanan tradisional dan gejala yang menyertainya, yakni keresahan sosial yang terus-menerus, telah mendorong peningkatan kegiatan dibidang keagamaan (Kartodirjo, 1992 : 207).

Pertumbuhan perasaan ke-Islam-an diabad ke dua puluh adalah refleksi dari posisi dan fungsi agama didalam kehidupan orang Indonesia. Bagi orang Indonesia Islam lebih dari agama, ia adalah tuntutan hidup. Menjadi sesuatu yang asli dan lawan dari yang asing, menjadi faktor pemersatu dan ukuran terhadap solidaritas nasional (Niel, 2009 : 125-126).

Guna mencari kerangka sosial pembentukan dari gerakan religiositas, maka kita perlu memahami kehidupan keagamaan yang membentuk lingkaran disekeliling kyai, guru mengaji, surau, pembentukan wadah-wadah berkumpul pemeluk agama Islam (seperti majelis dan tarekat), dan kenaikan jumlah penduduk yang mengikuti ibadah haji. Kajian ini tidak jauh membahas tentang sejauh apa kemudian aspek religiositas membentuk akar-akar dimasyarakat dan nilai-nilai yang tertanam didalamnya. Satu hal yang penting ialah bagaimana kemudian kehidupan keagamaan yang begitu kuat membentuk cara pandang terhadap para penguasa kolonial yang dianggap berbau asing dan penolakan terhadap keberadaan penguasa kolonial, sebagai manifestasi sikap anti terhadap barat.

Kebencian terhadap dominasi Belanda yang dipaksakan dan rasa permusuhan yang sangat mendalam terhadap segala hal yang berbau asing, yang mendasari keresahan umum, menemukan jalan keluar berupa persekutuan dengan gerakan-gerakan keagamaan yang ekstrim. Sebagai akibatnya maka gerakan-gerakan tersebut semakin bertambah kuat, melainkan juga memperoleh satu sarana kelembagaan yang lebih efektif yakni tarekat (Kartodirjo, 1992 : 208).

Perdagangan Kain dan Pertumbuhan Sekolah di Awal Abad ke-20

Fokus tulisan ini yang menitik beratkan kepada fenomena seragam sekolah dalam dunia pendidikan pada masa kolonial, merupakan rangkaian penyusunan yang diharapkan dapat menjawab satu pertanyaan dasar penelitian ini, yakni bagaimana memahami dinamika pendidikan Indonesia pada masa kolonial Belanda diawal abad ke-20 (1900-1942). Untuk itu diperlukan uraian-uraian penjelasan dan deskripsi atas segi-segi yang melatar-belakanginya, kompleksitas dinamika yang menyusunya serta kontur dan konjuktur yang akan melihat proses dan kedalamannya. Setelah menguraikan bagaimana segi-segi yang melatar-belakangi dan kemudian menjadi gambaran atas *field* (Arena) dari aspek spasial jalannya sejarah (dalam bentuk penjelasan umum latar sosial-ekonomi), maka akan dijabarkan bagaimana aktivitas sosial dan ekonomi tersebut berdinamika dalam paruh pertama abad ke-20, dalam wujud kemunculan seragam sekolah dan hubungannya dengan perdagangan kain di Jawa.

Sebelumnya telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya yang berkaitan dengan motif-motif dasar pembentukan pranata pendidikan di Hindia-Belanda. Sekolah adalah sebuah pranata pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial untuk diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang mampu menopang aktivitas ekonomi-kolonial. Menajaknya aktivitas ekonomi di tanah Jawa, tidak terlepas dari kedatangan para kaum urban yang memasuki tanah Jawa, terkadang cukup sulit untuk menjawab faktor manakah yang sangat berperan (segi-segi ekonomi atau segi-segi sosial), akan tetapi memandangnya sebagai satu gerak lurus yang berjalan paralel akan membuat kita lebih mudah memahaminya.

Perumpamaan "*ada gula, ada semut*", sepertinya dapat menjadi analog atas kedatangan kaum urban dan migran kedalam wilayah Jawa. Kedatangan orang-orang baik menetap ataupun hanya singgah di tanah Jawa, haruslah direspon dengan peningkatan produksi atas kebutuhan hidup manusia (sandang, pangan dan papan). Kebutuhan-kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi jika model produksi subsisten beralih menjadi mode industry yang berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan secara massal.

Secara umum pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1920, berdasarkan sensus penduduk di Jawa dan Madura, sekitar 7,63% penduduk tinggal di wilayah kota, dimana jumlahnya mencapai 10.000 lebih. Kemudian pada tahun 1930 jumlah tersebut menjadi naik mencapai angka 8,51% (1992: 73).

Angka jumlah penduduk yang terus meningkat tersebut menjadikannya sebagai tenaga sumber daya manusia yang cukup melimpah disatu sisi, akan tetapi disisi lain juga menjadi semacam pangsa pasar atas barang-barang komoditi. Kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni disatu sisi, berhadapan dengan pemenuhan produksi barang-barang kebutuhan hidup masyarakat menjadi fenomena yang lazim terjadi di Jawa pada paruh pertama abad ke-20 di Jawa. Pada titik inilah kemudian gejala pembentukan dan pendirian sekolah-sekolah sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni diwujudkan, seiring dengan hal tersebut, pasar komoditi kain sebagai penunjang kebutuhan hidup masyarakat berupa kebutuhan pakaian. Hal ini dapat dilihat dari jumlah naiknya angka penjualan/ perdagangan komoditi kain, yang berbanding lurus dengan angka jumlah berdirinya sekolah di tanah Jawa.

Berkaitan dengan sumber-sumber yang menjelaskan mengenai perdagangan kain dan produksi tanaman kapas di Nusantara, khususnya di Jawa sejak masa VOC sudah cukup banyak dilaporkan oleh para administrator VOC dan orang-orang Eropa lainnya yang berkunjung ke tanah Jawa. John Stockdale menjelaskan bahwa pada tahun 1778 kongsi dagang VOC mengirimkan kapas beserta komoditi perdagangan lainnya untuk di jual ke negeri Belanda sebanyak 65.000 lb kapas (Stockdale, 2014: 27). Selain itu VOC juga mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari import kain sutra dari India ditahun yang sama. Sejatinya produksi kapas memang sudah dijalankan di tanah Jawa, tanaman semak (*gossypium herbaceum*) yang dapat menghasilkan tanaman kapas sudah dibudidayakan di hampir semua tempat di pulau Jawa oleh penduduk pribumi, kecuali di wilayah Kesultanan Banten (Stockdale, 2014: 211-212).

Dalam aktivitas monopoli perdagangan yang dijalankan oleh VOC terhadap tanaman jenis kapas ini, VOC membeli produk tersebut sebesar

45, 35, 24 rix dolar, atau kurang dari itu per pikul dengan harga rata-rata 17 ½ d. 13 ½ d dan 9 5/14d sterling per pon. Mundur ketahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 1768 wilayah Jakarta dan Priangan menghasilkan komoditi kapas sebanyak 133 pikul atau 16.255 pon, dimana sebagian dikirim ke negeri Belanda dan sebagian lagi digunakan oleh masyarakat pribumi untuk membuat pakaian yang digunakan sendiri (Stockdale, 2014: 28).

Sumber lain yang menjelaskan mengenai perdagangan komoditi kapas dan kain juga diberikan oleh Thomas Raffles. Selama Raffles menjadi perwakilan imperium Inggris di Hindia-Belanda, pemerintahan Inggris berhasil mendapatkan produksi biji kapas sebanyak 60.000 pon, dengan harga jual 35 nikel/pon (Raffles, 2014: xxvi). Secara rinci Raffles juga menggambarkan mengenai harga jual kapas-kapas yang dihasilkan di Jawa. Kapas Jawa dalam bentuk kasar dan masih dalam keadaan mentah dijual seharga 3 s/d 3,5 sen per kati (tergantung kualitasnya), sementara itu kapas jenis muri dijual seharga 6-8 sen. Naik-turunnya harga jual dari masing-masing kapas tersebut menurut Raffles, sangat bergantung pada musim panen kapas-kapas tersebut. Bila musim panen hanya menghasilkan produksi kapas, maka harga masing-masing kapas dapat semakin membumbung tinggi, hingga mencapai setengah harga awal (Raffles, 2014: 108).

Lebih lanjut Raffles juga memberikan laporan mengenai pengolahan kapas-kapas tersebut menjadi benang dan kain hingga menghasilkan produk. Hasil pemintalan satu kati bijih kapas mentah akan menghasilkan sekitar ½ tukul atau gelondong kain kasar, dan sekitar 3 ½ gelondong benang halus. Sementara itu satu kati kapas muri akan menghasilkan 5 gelondong benang. Benang-benang yang dihasilkan oleh kapas-kapas tersebut dapat dijadikan pembuatan bahan baku kain sarung dan pengikat kepala. Tiga gelondong benang dan ½ bagian kain kasar dari 5-9 kain halus dapat dibuat satu kain sarung atau tiga pengikat kepala yang harga jualnya mencapai ½ rupee sampai 4 dolar Spanyol, dan kain batik seharga 1 rupee atau ½ -6 dolar Spanyol untuk jumlah yang sama (Raffles, 2014: 108).

Setelah pemerintahan Raffles berakhir dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Hindia-

Belanda, proses produksi kain dari tanah Jawa tetap dijalankan sebagai salah satu kebijakan ekonomi kolonial. Pada masa tanam paksa tahun 1833, produksi kapas dan pengolahan menjadi kain katun masuk sebagai komoditi yang harus diproduksi oleh masyarakat pribumi, dimana, pada setiap wilayah tanam, masyarakat harus menyiapkan dan menanam kapas (bahan baku pembuatan kain katun) seluas 5 bau (Kartodirdjo, 1993: 313). Masuknya tanaman komoditi kapas kedalam tanaman komoditi yang dihasilkan selama dasawarsa kebijakan tanam paksa, ternyata tidak dapat mencukupi kebutuhan atas ketersediaan kapas di Hindia-Belanda (khususnya di Jawa). Maka dari itu menurut laporan Van den Bosch, pemerintah kolonial melakukan kebijakan import komoditi kapas yang berasal dari Inggris dan beberapa Negara Eropa lainnya (Fiurnivall, 2009: 140).

Tahun	Barang Kapas			
	Nilai total	Dari Negeri Belanda	Asal Negeri Belanda	Dari Inggris
1830	3.884	2.550	2.373	1.217
1831	2.936	1.657	1.389	1.206
1832	1.963	1.412	67	453
1833	3.984	1.321	90	2.581
1834	4.450	877	330	3.431
1835	4.134	1.744	1.549	2.240
1840	13.100	9.917	8.832	2.890
1845	10.934	6.123	5.320	4.410
1850	9.837	4.773	3.743	4.147

Sumber diolah melalui : .S. Furnivall, "Hindia Belanda Studi Tentang Ekonomi Majemuk.

Faktor geografis dan jumlah kedatangan kaum urban dan migrant yang datang ke kota-kota di besar di Tanah Jawa, seperti Batavia, Banten, Priangan, Cirebon, Semarang, Surakarta, Yogyakarta dan Surabaya membuat penanaman dan produksi atas kapas dan kain tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan permintaan pasar atas dua komoditi tersebut. Seiring dengan

menajaknya kebutuhan dan permintaan terhadap komoditi kapas dan kain, dalam bidang politik juga terjadi perubahan terhadap kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Hal ini terkait dengan hasil perjanjian Konvensi London, dimana dalam perjanjian tersebut, Belanda mendapatkan kembali Nusantara dengan syarat Belanda melaksanakan sistem perdagangan bebas diseluruh kawasan Nusantara (Poelinggomang, 2002: 1).

Penerapan kebijakan kawasan perdagangan bebas yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, secara umum memang tidak terjadi sepenuhnya di Nusantara, hanya dibebepaya wilayah seperti : Makassar, Bali dan Maluku yang masih berlaku kebijakan perdagangan tertutup. Akan tetapi beberapa pelabuhan di Jawa seperti Batavia, Semarang dan Surabaya terjadi atau diterapkan kebijakan perdagangan bebas. Komoditi-komoditi yang masuk dan membanjiri pasar di tanah Jawa salah satunya adalah kain yang bersumber dari India dan China. Komoditi kain tersebut berasal dari salah satu bandar dagang Inggris yang cukup kuat di kawasan Asia Tenggara, yang tidak lain adalah wilayah Singapura. Barang-barang komoditi yang masuk dari bandar dagang di Singapura tidak lain adalah produk-produk yang laku di pasaran internasional dan memiliki nilai jual yang tidak terlalu mahal.

Memasuki awal abad ke-20 seiring dengan semakin derasnya laju perdagangan bebas yang membajiri pasar di tanah Jawa dengan komoditi kapas dan kain, baik yang berasal dari dalam dan luar tanah Jawa. Keadaan ini memunculkan beberapa usaha / mata pencaharian yang menggunakan kapas dan kain sebagai bahan baku utama produknya. Beberapa usaha tersebut adalah usaha pembuatan benang dan penenunan kain atau kain batik dan beberapa usaha konfeksi pakaian (Memori Serah Jabatan 1921-1930, ANRI, 1980: XXVI, LVI). Munculnya usaha-usaha pemintalan benang, penenunan kain dan konfeksi pakaian, sejatinya tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam melindungi tubuh dari pengaruh cuaca, serangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan serangga. Akan tetapi seiring lajunya perkembangan kehidupan masyarakat modern khususnya di Jawa awal abad ke-20 perubahan dan perkembangan pakaian berorientasi pada

status, simbolik dan etika serta estetika (Nurhajarini dalam Sri Margana, 2010: 117).

Di Jawa awal abad ke-20, pakaian sebagai media etika, estetika yang kemudian begeser menjadi status, dan simbolis dapat terjadi karena kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dalam seluruh lapangan kehidupan masyarakat di Jawa (aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas religi, dan lain sebagainya), pemerintah kolonial Hindia-Belanda menyusun tata cara berpakaian bagi seluruh masyarakatnya baik yang berasal dari luar (Eropa, China, Arab) dan masyarakat pribumi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah kolonial sebagai upaya untuk melakukan kontrol terhadap kehidupan sosial di Jawa, selain sebagai kontrol, kebijakan ini juga menjadi pertanda antara penguasa dan orang-orang yang dikuasainya (Nurhajarini dalam Sri Margana, 2010: 127).

Bagaimana kemudian pakaian dan kebijakan pakaian (seragam) dapat memasuki dunia pendidikan di tanah Jawa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah mendapatkan deskripsi atas kemunculan sekolah-sekolah bergaya barat tersebut melalui sub-bab sebelumnya dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang kebijakan politik Etis. Pendidikan sebagai langkah strategis kebijakan politik-ekonomi pemerintahan kolonial, menjadi wahana yang berada dalam relasi kuasa pemerintahan kolonial. Pemerintahan kolonial tidak hanya berkepentingan terhadap hasil (*out-pout*) dunia pendidikan, akan tetapi berkepentingan untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat di Jawa (sebagai upaya pemisahan dan kontrol sosial).

Pada awal kemunculannya pendidikan di Hindia-Belanda diperuntukkan bagi anak-anak dari pegawai Eropa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Pemerintah kolonial kemudian juga membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga bangsawan di tanah Jawa, Di Jawa Tengah seperti keluarga bangsawan Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, keluarga Pakualaman dan Mangkunegaran. Sementara itu di Jawa bagian Barat, pendidikan juga dibuka bagi keluarga Kesultanan Cirebon dan Keluarga Menak di wilayah Priangan. Secara periodeisasi pendidikan dan pengajaran dalam bentuk pendirian sekolah di tanah Jawa terbagi

dalam dua periode. Pendidikan dan pengajaran pertama dilakukan sejak akhir abad ke-18, yang di Batavia beserta Hindia-Belanda bagian timur (Manado, Makassar, Buton, Maluku), kemudian di Jawa bagian Tengah dan Timur pendidikan dan pengajaran mulai dibangun sejak tahun 1840-an (Kartodirdjo, 1993: 349).

Setelah pemerintah kolonial Hindia-Belanda berhasil menguasai hampir seluruh tanah Jawa, dan membagi-bagi wilayah kekuasaan berdasarkan wilayah-wilayah administratif (Karesidenan), dimulailah satu kebijakan yang menekankan kebutuhan pendidikan dan pengajaran di tanah Jawa. Pemerintah kolonial melalui para Residen, memerintahkan didirikannya lembaga pendidikan (sekolah) di setiap Karesidenan yang mereka pimpin. Guna mendukung langkah dan kebijakan tersebut, Gubernur sudah menyiapkan subsidi sebesar f.25.000 pada tahun 1848 (Kartodirdjo, 1993: 349). Pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah-sekolah tersebut hanya diperuntukkan bagi anak-anak pegawai Eropa dan pejabat pribumi yang terkemuka. Persoalan yang ditemukan dalam pendirian sekolah tersebut, terletak pada bahasa pengantar yang diberikan. Maka dari itu disusunlah strata pendidikan yang terbagi atas empat kategori sekolah : (1) sekolah Eropa yang sepenuhnya memakai model sekolah Negeri Belanda; (2) sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar; (3) sekolah bagi pribumi yang memakai bahasa daerah/pribumi sebagai bahasa pengantar; (4) sekolah yang memakai sistem pribumi (Kartodirdjo, 1993: 76).

Menurut Sartono Kartodirdjo (1992: 76), kedudukan sekolah dari tipe 1 dan 2 merupakan sekolah yang cukup strategis, karena dalam pengajaran dan out-put nya akan menghasilkan tamatan yang siap menjalankan fungsi-fungsi dalam sektor-sektor dimana Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar. Dalam keadaan yang demikian menurut Sartono Kartodirdjo, jabatan-jabatan yang diemban oleh lulusan dari sekolah-sekolah tersebut tidak hanya lebih berstatus, tetapi juga membawa pendapatan yang cukup.

Memasuki awal abad ke-20 dengan semakin berkembangnya urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat di Jawa menjadi ekonomi industri, kemudian diimbangi dengan penyusunan birokrasi kolonial maupun pengerahan birokrasi

lokal dalam jajaran *Binnenlands Bestuur* (BB), bidang pendidikan dan pengajaran dalam sekolah tidak lagi hanya bersifat normatif (baca, tulis dan hitung). Muatan pendidikan dan pengajaran sudah berkembang pada tahun 1920-an menuju tingkatan menengah kejuruan dan sekolah tingkat tinggi (Kartodirdjo, 1993: 74). Hal ini dirasakan oleh pemerintah kolonial sebagai kebutuhan yang mendesak untuk dapat mengimbangi percepatan roda ekonomi dan maksimalisasi potensi sumber daya manusia yang ada di tanah Jawa, yang jumlahnya sangat melimpah.

Terkoneksinya dunia pendidikan dengan kehidupan ekonomi dan politik pemerintahan, sebagai basis penopang ideologi kolonial di awal abad ke-20 menjadi dasar utama bagi pemerintahan kolonial mewujudkan cita-cita *Pax Nerlandica*. Slogan-slogan dibawah satu pemerintahan kolonial dengan menjaga keamanan dan ketertiban dalam semboyan *Rust en Orde* merupakan pedoman bagi pemerintah kolonial dalam menyelenggarakan kehidupan sosial masyarakat di tanah Jawa (Kartodirdjo, 1992: 74). Kebijakan kolonial yang mengharuskan para pegawai pemerintah yang berasal dari kalangan Eropa untuk bekerja lebih dekat dengan para pegawai pemerintahan yang berasal dari kalangan bumiputera, sudah dimulai sejak pada masa pendidikan dan pengajaran, meskipun masih terdapat pembatas dan pemisahan.

Penyatuan dunia pendidikan dengan kehidupan ekonomi disatu sisi memberikan kesempatan untuk membuka arena baru atau saluran dalam pergerakan modal (*capital*), disisi lain pengintegrasian tersebut memberikan jaminan untuk menjaga ketersediaan sumber daya manusia untuk digunakan dalam menggerakkan dunia industri. Pergerakan modal (*capital*) dalam sistem ekonomi kapitalisme merupakan salah satu syarat dalam menjamin keberlangsungan sistem ekonomi tersebut.

Kehadiran dunia pendidikan dalam bentuk sekolah-sekolah di Hindia-Belanda memberikan kesempatan bagi masuknya aliran modal dalam kerangka penyusunan kelengkapan suprastruktur dan infrastrukturnya. Hal ini ditandai dengan munculnya undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah yang menjadi dasar legitimasi, serta masuknya sumber daya manusia dan barang-barang produksi yang digunakan

untuk kebutuhan operasional kegiatan di sekolah seperti : keberadaan pengawas pemerintahan, kepala sekolah, guru pengajar, pembantu sekolah, buku tulis, alat tulis, pakaian seragam, alas kaki, dan kelengkapan sekolah dan pembelajaran lainnya.

Fashion dan Seragam Sekolah Masyarakat Kolonial

Sebelum membahas mengenai seragam sekolah sebagai sebuah fenomena yang lazim dijumpai pada aktivitas pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah pada dekade awal abad ke-20, terlebih dahulu akan diberikan gambaran mengenai gejala-gejala yang disebut dengan proses pengimitasian (meniru) dan selera berpakaian yang terjadi pada masyarakat di tanah Jawa. Secara umum dapat digambarkan bahwa jenis pakaian atau selera berpakaian masyarakat pribumi di tanah Jawa menggunakan model sarung, kain dan kebaya. Kain dan kebaya dikenakan oleh para perempuan dan kaum pria menggunakan sarung dan baju *takwo* (Soekiman, 2011: 30-31). Jenis pakaian ini kelak tidak hanya digunakan oleh kelompok pribumi, akan tetapi juga digunakan oleh para wanita dan pria Eropa.

Pembauran dari penggunaan pakaian yang terjadi pada masyarakat Hindia-Belanda, sepanjang masa penguasaan pemerintah kolonial Hindia-Belanda memang tidak didapatkan kepastian kapan proses tersebut mulai terjadi. Djoko Soekiman (2011: 30-31) dalam bukunya yang berjudul "Kebudayaan Indis" tidak menjelaskan kapan proses pembauran berpakaian tersebut terjadi, akan tetapi, Djoko Soekiman hanya menjelaskan bahwa pembauran berpakaian tersebut terjadi karena pengaruh interaksi antara para pembantu rumah tangga (pribumi) dengan para majikan mereka (orang eropa).

Mengenai alasan-alasan mengapa orang-orang Eropa kemudian menggunakan jenis pakaian yang digunakan oleh kelompok masyarakat pribumi diakibatkan oleh beberapa faktor : (1) faktor iklim/ cuaca menjadi alasan pertama yang menjadi alasan pemilihan cara berpakaian para kaum pendatang dari Eropa tersebut. Cuaca panas yang menjadi ciri khas iklim di wilayah tropis seperti Nusantara, membuat masyarakat di tanah Jawa mengadaptasikan cara atau pemilihan berpakaian mereka (Stockdale, 2014: 113); (2) faktor berikutnya adalah mengenai harga dari bahan baku pakaian yang secara umum dikuasai

oleh kelompok China. Kain dengan kualitas yang cukup bagus memiliki harga jual yang cukup mahal. Bahan-bahan kain dengan kualitas baik tersebut umumnya dijual oleh pedagang China yang berada di Pasar Baru (Batavia) (Herlina, 1998: 186), dimana pada umumnya berbahan dasar beludru dan sutera yang memiliki nilai jual (harga) yang cukup mahal, dibandingkan dengan kain atau sarung yang berbahan dasar kapas Jawa dan kapas Muri (jenis kapas yang memiliki kualitas tidak sebaik bahan beludru dan sutera).

Selain proses pengimitasian yang dilakukan oleh kaum pendatang yang berasal dari Eropa, proses peniruan juga dilakukan oleh para kelompok pribumi, akan tetapi gejala ini hanya berlaku pada kelompok pribumi yang berasal dari golongan elite tradisional, seperti keluarga bangsawan. Proses ini terus berlanjut hingga masa akhir pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, sementara itu penggunaannya semakin berkembang dan meluas ketika mode berpakaian ala Eropa (dapat diakses oleh pegawai negeri rendahan, anak-anak abdi dalem, kelompok pedagang dikota-kota besar) diterapkan dalam aktivitas sosial masyarakat di Jawa, seperti disekolah-sekolah dan perkantoran (Herlina, 1998: 190).



Gambar 1.

Sumber : Diambil dan diolah dari Susan Blackburn, Jakarta Sejarah 400 tahun, (Masup Jakarta, 2011) hlm.106.



Gambar 2.

Sumber : diambil dan diolah dari Robert van Niel, munculnya Elite Modern Indonesia (Pustaka Jaya, 2009) cover muka.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa proses pembauran dari pilihan-pilihan berpakaian, serta gejala pengimitasian antara kedua belah pihak (kelompok Eropa dan Pribumi) menjadi sebuah gejala sosial yang terjadi akibat proses interaksi sosial yang cukup lama. Salah satu wahana yang kemudian menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya pilihan-pilihan fashion (pakaian) tersebut adalah pranata pendidikan (sekolah). Berdirinya pendidikan ala Barat hampir diseluruh wilayah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial termasuk tanah Jawa didalamnya para anak-anak pribumi mulai dikenalkan dengan pakaian-pakaian yang bermodel Eropa. Salah satu model pakaian ala Eropa yang kemudian digunakan oleh para anak-anak pribumi adalah jenis pantolan yang dilengkapi pula dengan menggunakan alas kaki berupa sepatu, kaos kaki, dan juga ikat pinggang, sementara itu untuk anak wanita menggunakan rok (Nurhajarini dalam Sri Margana, 2010: 125-126). Fenomena ini terjadi dalam skala yang luas pada tahun 1930-an, dimana bukan hanya anak-anak pribumi saja yang menggunakan, akan tetapi juga digunakan oleh para pegawai pemerintahan setingkat bupati (Herlina, 1998: 189-191).

Pakaian ala Barat yang digunakan oleh anak-anak pribumi pada saat bersekolah pada awalnya hanya digunakan oleh anak-anak yang berasal dari kalangan kerajaan (keraton), akan tetapi penggunaan pakaian seragam dengan ala Barat tersebut semakin luas menjalar kepada anak-anak dipertanian. Penggunaan pakaian ala Barat tersebut juga tidak hanya terjadi pada tingkatan sekolah dasar, akan tetapi juga merambah hingga sekolah menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi. Meskipun dalam perjalanannya penggunaan pakaian seragam sekolah ala barat mendapatkan banyak kritik, tidak hanya berasal dari kelompok Eropa (pegawai pemerintahan yang berasal dari Eropa) dan juga kelompok pribumi yang memiliki tata-cara berpakaian sesuai dengan nilai-nilai tradisi dan religi wilayah masing-masing. Sebagai contoh kasus adalah surat protes yang dilayangkan oleh kelompok *menak tinggi* di Priangan tentang cara berpakaian bawahannya yang lebih kebarat-baratan (Herlina, 1998: 190; Kuntowijoyo, 2006: 25-27).

Melalui deskripsi atas terbentuknya model berpakaian yang digunakan oleh masyarakat di tanah Jawa pada masa kolonial ini, tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor yang secara eksplisit telah dikemukakan. *Pertama*, pembauran dan penggunaan pakaian seragam sekolah yang kemudian menjadi fenomena umum yang terjadi, diakibatkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi di Hindia-Belanda, berkaitan dengan produksi kapas, benang dan kain yang berasal dari tanah Jawa. Selain itu juga terjadi surplus yang cukup besar ketika komoditi kain membanjiri pasar di tanah Jawa, akibat aktivitas import yang berasal dari Singapura, wilayah perniagaan yang dikuasai oleh Inggris.

Kedua, fenomena *fashion* seragam sekolah juga dapat terjadi karena adanya kebijakan sosial dan budaya dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pendirian sekolah-sekolah yang diarahkan untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia di tanah Jawa, dalam kerangka melakukan eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Jawa. Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi dasar terhadap penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi-politik dan sosial budaya pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dalam hal ini berarti membuktikan kebenaran terhadap teori sejarah yang mengatakan bahwa kekuatan utama sejarah terletak pada kemampuan manusia untuk

mengelola lingkungan alam dan lingkungan sosial yang mengitarinya.

Ketiga, fenomena penggunaan seragam sekolah di Jawa pada masa kolonial juga disebabkan oleh hasil-hasil akibat dari proses interaksi sosial yang telah berjalan lama. Proses-proses sosial tersebut terjadi dalam relasi produksi (hubungan ekonomi/pekerjaan). Beberapa contoh kasus menunjukkan proses imitasi tersebut terjadi, seperti contoh kasus (1) hubungan antara pembantu rumah tangga dengan majikannya, yang membuat sang majikan mengikuti pola hidup masyarakat pribumi, tidak hanya dalam soal fashion (pakaian), tetapi juga penggunaan tempat tinggal, perawatan tubuh dan lain sebagainya. (2) disisi lain juga terdapat kasus antara dalam hubungan kerja di kantor pemerintahan. Dalam kasus ini terjadi beberapa pegawai pemerintah atas dan bawahan yang mengikuti cara berpakaian ala Eropa. Hubungan relasi produksi/ekonomi tersebut menghasilkan sumber-sumber pendapatan (modal), yang kemudian menjadi alat untuk merubah konstruksi penampilan pada tubuh, dimana salah satunya ialah pakaian yang pada awalnya hanya berfungsi melindungi tubuh, berkembang menuju ke arah etika, estetika, status sosial dan simbol.

PENUTUP

Penyatuan dunia pendidikan dengan kehidupan ekonomi disatu sisi memberikan kesempatan untuk membuka arena baru atau saluran dalam pergerakan modal (*capital*), disisi lain pengintegrasian tersebut memberikan jaminan untuk menjaga ketersediaan sumber daya manusia untuk digunakan dalam menggerakkan dunia industri. Pergerakan modal (*capital*) dalam sistem ekonomi kapitalisme merupakan salah satu syarat dalam menjamin keberlangsungan sistem ekonomi tersebut. Kehadiran dunia pendidikan dalam bentuk sekolah-sekolah di Hindia-Belanda memberikan kesempatan bagi masuknya aliran modal dalam kerangka penyusunan kelengkapan suprastruktur dan infrastrukturnya. Hal ini ditandai dengan munculnya undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah yang menjadi dasar legitimasi, serta masuknya sumber daya manusia dan barang-barang produksi yang digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan di sekolah seperti : keberadaan pengawas pemerintahan, kepala sekolah, guru pengajar, pembantu sekolah, buku tulis, alat tulis, pakaian seragam,

alas kaki, dan kelengkapan sekolah dan pembelajaran lainnya. Melalui deskripsi atas terbentuknya model berpakaian yang digunakan oleh masyarakat di tanah Jawa pada masa kolonial ini, tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor yang secara eksplisit telah dikemukakan.

Pertama, pembauran dan penggunaan pakaian seragam sekolah yang kemudian menjadi fenomena umum yang terjadi, diakibatkan oleh peningkatan aktivitas ekonomi di Hindia-Belanda, berkaitan dengan produksi kapas, benang dan kain yang berasal dari tanah Jawa. Selain itu juga terjadi surplus yang cukup besar ketika komoditi kain membanjiri pasar di tanah Jawa, akibat aktivitas import yang berasal dari Singapura, wilayah perniagaan yang dikuasai oleh Inggris.

Kedua, fenomena *fashion* seragam sekolah juga dapat terjadi karena adanya kebijakan sosial dan budaya dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pendirian sekolah-sekolah yang diarahkan untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia di tanah Jawa, dalam kerangka melakukan eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Jawa. Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi dasar terhadap penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi-politik dan sosial budaya pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dalam hal ini berarti membuktikan kebenaran terhadap teori sejarah yang mengatakan bahwa kekuatan utama sejarah terletak pada kemampuan manusia untuk mengelola lingkungan alam dan lingkungan sosial yang mengitarinya. *Ketiga*, fenomena penggunaan seragam sekolah di Jawa pada masa kolonial juga disebabkan oleh hasil-hasil akibat dari proses interaksi sosial yang telah berjalan lama. Proses-proses sosial tersebut terjadi dalam relasi produksi (hubungan ekonomi/pekerjaan).

DAFTAR RUJUKAN

- John Josep Stockdale. 2014. Sejarah Tanah Jawa (terjemahan). Indoliterasi. Yogyakarta.
- Thomas Raffles. 2014. The History of Java (terjemahan). Narasi. Yogyakarta.
- Blackburn, Susan. 2011. Jakarta: Sejarah 400 Tahun. Masup. Jakarta.
- Furnivall, J.S. 2009. Hindia-Belanda Studi Tentang Ekonomi Majemuk. Freedom Institute. Jakarta
- Kartodirjo, Sartono. 1992. Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Gramedia. Jakarta.
- _____. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 Dari Emporium sampai Imperium. Gramedia. Jakarta.
- Niel, van. Robert. 2009. Munculnya Elite Modern Indonesia. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Tilaar, H.A.R. 2004. Multikulturalisme : Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Garsindo. Jakarta.
- Darsono, P. 2006. Ekonomi Politik dan Aksi Revolusi. Diadit Media. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2004. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta : Djambatan.
- Kuntowijoyo. 2006. Raja, Priyayi dan Kawula. Ombak. Yogyakarta.
- Margana, Sri dan Nursam (editor). 2010. Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial. Ombak. Yogyakarta
- Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat), 1976. ANRI
- Sutrisno, Mudji dan Putranto, Hendar. 2005. Teori-teori Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius